

“Perebutan Ruang Udara:” Kontestasi Jaringan Radio di Bawah Pengawasan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, 1934-1942

Debora Alfi Dwidi Teofani*, Dhanang Respati Puguh, Yety Rochwulaningsih

Program Studi S2 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. dr. A. Soeroyo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

*Penulis korespondensi: deboraalfidt@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.68636>

Diterima/ *Received*: 13 Desember 2024; Direvisi/ *Revised*: 5 Januari 2026; Disetujui/ *Accepted*: 6 Januari 2026

Abstract

This article examines the contestation between the Dutch East Indies colonial government's radio networks and locally-owned private radio stations as political instruments for control and propaganda dissemination within the colony. Utilizing historical and archival research methods, this study identifies the Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) as the sole government-sanctioned radio network following the enactment of the 1934 broadcasting legislation. Although under colonial ownership, NIROM incorporated Malay-language programming, initially intended as a strategic medium to neutralize nationalist movements. However, the medium underwent a functional shift as Indonesian youth co-opted radio to mobilize nationalist sentiment. This shift was propelled by the emergence of "Eastern broadcasts" (siaran ketimuran) managed entirely by indigenous youth, fostering a competitive environment between the state and local private entities. The findings demonstrate that radio served as a vital propaganda medium for independence, successfully subverting the constraints of colonial surveillance.

Keywords: NIROM; Radio; Politics; Propaganda Media.

Abstrak

Artikel ini berfokus pada persaingan antara radio milik pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan radio swasta milik lokal sebagai salah satu alat politik untuk mengontrol dan menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya. Artikel ini disusun dengan metode sejarah dan studi pustaka. Nederlands Indiesche Radio Omroep (NIROM) merupakan satu-satunya jaringan radio milik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diizinkan oleh pemerintah sejak Undang-Undang tentang penyelenggaraan radio siaran diterbitkan pada 1934. Meskipun jaringan radio ini berada di bawah kepemilikan pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun terdapat beberapa program siaran yang dilakukan dengan bahasa Melayu. Pada awalnya, NIROM dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai media propaganda untuk melawan kaum pergerakan. Akan tetapi, pada perkembangannya, radio ini justru dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia sebagai media untuk menggalang semangat kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radio dapat menjadi media propaganda dalam memperjuangkan kemerdekaan meskipun berada di dalam pengawasan pemerintah kolonial. Hal itu disebabkan oleh kemunculan siaran ketimuran yang dikelola sepenuhnya oleh para pemuda Indonesia, sehingga ada persaingan di antara jaringan radio milik pemerintah dengan swasta lokal.

Kata Kunci: NIROM; Radio; Politik; Media Propaganda.

Pendahuluan

Kajian ini berfokus pada persaingan jaringan radio sebagai alat politik pada masa kolonial Hindia Belanda. Kebutuhan radio sebagai alat komunikasi yang dipandang paling tepat sebagai media untuk berhubungan jarak jauh, maka radio memiliki posisi yang sangat penting pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial

Hindia Belanda memerlukan alat komunikasi yang dapat menerima atau mengirim pesan ke negeri induknya dengan cepat. Sementara itu, alat komunikasi pada masa tersebut belum mengalami perkembangan dan masih belum memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat yang dapat menghubungkan negara jajahan dengan negeri induk penjajah dan alat yang paling tepat adalah radio (Untyawati 1988, 3-4). *Nederlands-*

Indiesche Radio Omroep Maatshappij (NIROM), merupakan salah satu media propaganda milik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang didirikan untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan siaran radio di wilayah kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu, secara khusus, kajian ini membahas tentang siaran ketimuran NIROM yang bersaing dengan siaran ketimuran milik radio swasta nasional. Di sisi lain, siaran ketimuran tersebut merupakan salah satu celah bagi para kaum pergerakan nasional untuk memanfaatkan momen tersebut untuk melahirkan semangat perjuangan.

Penggunaan radio telah mengalami perkembangan sejak peristiwa Perang Dunia I dan II berlangsung. Saat itu, radio dimanfaatkan sebagai alat komunikasi untuk mengirim pesan bagi para pasukan antar negara. Pada perkembangannya, pemanfaatan radio semakin meluas, antara lain sebagai media utama penyebaran informasi dan hiburan (Sakinah, dkk. 2023, 91). Memasuki awal abad ke-20, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, penyebaran musik-musik global salah satunya masuk melalui radio (Barendregt dan Bogaerts 2016, 14). Muncul asumsi bahwa masyarakat lebih senang mendengarkan musik melalui siaran langsung daripada rekaman gramofon, sehingga terjadi peningkatan jumlah siaran langsung dari radio (Yampolsky 2014, 50).

Eksistensi radio di wilayah Hindia Belanda bermula pada Maret 1934, ketika pemerintah kolonial Hindia membentuk sebuah perusahaan radio bernama *Nederlands-Indiesche Radio Omroep Maatshappij* (NIROM). Perusahaan radio tersebut merupakan satu-satunya lembaga yang diizinkan untuk menyelenggarakan radio siaran, sehingga menjadi perusahaan jaringan radio utama yang menaungi berbagai siaran radio yang tersebar di wilayah Hindia Belanda (Leksono 2014, 38). Para pendengar siaran radio pada saat itu harus membayar untuk siaran NIROM yang beragam. Sebelumnya, pendirian lembaga siaran ini diawali oleh pendirian perkumpulan *Bataviase Radio Vereeniging* (BRV) pada 16 Juni 1925 oleh para penjajah. Lembaga ini menyelenggarakan acara siaran dalam bahasa Belanda dengan target pendengarnya dari kalangan mereka. Pada

perkembangannya, mulai muncul beberapa radio kebangsaan yang dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial terjadi adanya perlawanan dari bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pemanfaatan radio oleh para kaum pergerakan menjadikan radio memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia yang modern. Hal itu dikarenakan selain berperan sebagai instrumen pembangunan bangsa, radio juga menjadi salah satu instrumen yang sedang dibangun bagi aktivitas sosial, budaya, dan politik sebagai unsur-unsur pembentuk bangsa (Wild 1987, 15).

NIROM lahir pada 1934 bersamaan dengan penetapan *Radiowet* oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda terkait tata cara pendirian dan penyelenggaraan radio siaran. Undang-undang tentang radio tersebut diterbitkan sebagai langkah antisipasi pemerintah Kolonial Hindia Belanda akan kemungkinan penggunaan radio sebagai media untuk membangkitkan semangat kebangsaan masyarakat Indonesia. Meskipun diberlakukan aturan yang ketat terkait siaran radio, namun ternyata terdapat paradoks dalam penerapannya karena NIROM pada masa pergerakan dimanfaatkan oleh kaum penjajah sebagai alat untuk propaganda menentang kaum pergerakan ("Ismail Marzuki: Lagu Perjuangan Penuh Emosi dan Romantis"). Pada masa-masa itulah berbagai siaran ketimuran lainnya juga muncul sebagai salah satu media perlawanan terhadap propaganda penjajah. Dengan demikian, kajian ini berupaya menganalisis bagaimana penyebaran nasionalisme tetap dapat dilakukan meskipun media massa berada dalam pengawasan pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara penuh.

Philip Yampolsky (2014) telah melakukan kajian terkait kedudukan radio dan radio musik dalam isu-isu besar yang terjadi sepanjang 1930-an di Indonesia. Ia mengungkap terkait hubungan radio dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada awal abad ke-20. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan radio juga dipengaruhi oleh situasi politik dari sebuah bangsa (Yampolsky 2014, 49). Hal itu dapat disebabkan oleh pengaruh radio yang mampu menempatkan audiens pada posisi yang tinggi sehingga mereka dapat menyuarakan pandangan mereka terkait situasi dan kondisi yang sedang dihadapi (Yampolsky 2013, 25).

Berdasar pada kajian yang telah dilakukan oleh Jenifer Lindsay (1997), jumlah pendengar radio di Hindia Belanda tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah koloni lainnya. Dapat dikatakan bahwa jumlah pendengar non-Eropa secara umum dapat setara dengan pendengar Eropa. Pada 1939, terdapat empat puluh dua ribu lisensi penerimaan radio yang dipegang oleh para pribumi dan orang Asia lainnya dibandingkan dengan orang Eropa (Lindsay 1997, 109).

Kajian mengenai siaran radio juga telah dilakukan oleh Budiarto, Yuliati, dan Puguh (2024). Akan tetapi, kajian tersebut berfokus pada siaran radio di Jawa pada masa pendudukan Jepang. Dalam Perang Dunia II, radio menjadi salah satu media komunikasi efektif yang digunakan untuk menyebarkan berita dan propaganda. Pemerintah militer Jepang di Jawa melakukan upaya kontrol atau sensor terhadap radio-radio yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya kontrol dan sensor tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak mendengarkan siaran-siaran yang diudarakan oleh pihak Sekutu. Di sisi lain, radio juga bermanfaat bagi Jepang untuk menyebarkan propaganda ke masyarakat (Budiarto, Yuliati, dan Puguh 2024, 101). Hal itu juga berlangsung pada periode sebelumnya, yaitu periode penjajahan Belanda. Akan tetapi, pada masa kolonial, seluruh lembaga siaran radio berada di bawah kepemilikan pemerintah kolonial.

Kajian mengenai *Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM) sebagai media propaganda pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi menarik, karena meskipun siaran radio berada dalam pengawasan pemerintah, penyebaran nasionalisme Indonesia tetap dapat dilakukan oleh para tokoh secara terselubung.

Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yaitu suatu proses mengumpulkan, menguji, dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk 1983, 32). Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan rekonstruksi. Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber. Sumber-sumber yang digunakan dalam menyusun

artikel ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa sumber tertulis, yaitu arsip dan surat kabar sezaman dan majalah yang membahas tentang peran radio sebagai media propaganda. Sementara itu, sumber sekunder berupa pustaka yang berupa artikel pada jurnal dan buku-buku yang disusun dengan menggunakan dan atau membahas tentang radio pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pustaka-pustaka itu dapat digunakan untuk memahami pemanfaatan radio oleh para tokoh-tokoh nasionalis, khususnya NIROM, sebagai siaran radio resmi pemerintah kolonial untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat. Data dan informasi yang telah ditemukan melalui penelusuran sumber kemudian dilakukan penilaian untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang kredibel melalui kritik sumber. Berbagai fakta sejarah yang relevan dengan objek kajian kemudian dihubung-hubungkan dengan tidak meninggalkan aspek kronologi dan kausalitasnya sebagai bagian dari proses interpretasi. Hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah tersebut kemudian disusun menjadi kisah dalam bentuk historiografi.

Radio di Bawah Pengawasan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, 1934-1942

Radio merupakan media elektronik yang paling tersebar luas di dunia saat ini. Meskipun radio sering dianggap sebelah mata sebagai bagian dari "media baru" secara visual dan digital, akan tetapi radio tetap menjadi pusat kehidupan sehari-hari dari masyarakat (Bessire dan Fisher 2013, 364).

Perkembangan radio di Indonesia baru benar-benar mengalami perkembangan ketika berada di bawah penguasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada awalnya, radio hanya dapat diperdengarkan oleh orang-orang dengan golongan ekonomi menengah atas pada awal abad ke-20. Meskipun hanya terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, minat masyarakat terhadap penyiaran dan penerimaan radio sangat besar sehingga memiliki partisipasi yang luas (Puguh 2017, 139). Selain itu, siaran radio hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Keberadaan radio pertama kalinya di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1920-an

yang berkaitan erat dengan kepentingan penjajahan Belanda di Indonesia secara khusus.

Dapat diketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda memiliki hubungan erat dengan wilayah-wilayah jajahannya seperti Hindia Belanda. Radio menjadi penting karena pemerintah kolonial Belanda perlu menyampaikan peraturan dan undang-undang, serta berbagai berita penting. Pada perkembangannya, keberadaan radio menjadi lebih penting dan mendesak ketika meletusnya PD I (Sakinah, Azizah, Ulya, dan Arifin 2023, 91).

Sebelum NIROM resmi didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, telah ada perusahaan-perusahaan nasional yang didirikan oleh para kaum pergerakan terlebih dahulu. Beberapa perusahaan nasional tersebut antara lain *Solosche Radio Vereniging* (SRV) di Solo, *Mataramsche Vereeniging voor Radio Omroep* (MAVRO) di Yogyakarta, Siaran Radio Semarang di Semarang, *Vereniging Oostersche Radio Luistras* (VORL) di Bandung, dan *Chinesse en Intreemse Radio Luisteraat Vereniging Oost Java* (CIRVO) di Surabaya ("Perdjoangan Radio Republik Indonesia," *Merdeka* 1951).

Siaran radio pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah *Bataviase Radio Vereniging* (BRV) yang berdiri di Batavia atau saat ini dikenal sebagai wilayah Jakarta. Siaran radio itu resmi berdiri pada 16 Juni 1925. Adapun siaran-siaran radio yang berkembang di wilayah Hindia Belanda pada saat itu memiliki status sebagai perusahaan swasta. Dengan diresmikannya *Bataviase Radio Vereniging* (BRV) di Batavia, maka mulai muncul badan-badan radio siaran lainnya seperti *Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij* (NIROM) yang siarannya tersebar luas di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, dan Medan, *Solossche Radio Vereniging* (SRV) dan *Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep* (VORO) di Surakarta, *Chineese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java* (CIRVO) di Surabaya, *Eerste Madiunse Radio Oemrop* (EMRO) di Madiun, serta beberapa lembaga siaran radio lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Pulau Jawa (RRI 2023). Di antara berbagai lembaga siaran radio yang telah ada di Indonesia saat itu, NIROM merupakan siaran

radio yang terbesar dan terlengkap karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dengan kata lain, NIROM memegang monopoli radio di tanah jajahan (Jedamski 2001, 924).

Pada akhir 1930-an, radio di Hindia Belanda menjadi media budaya dan hiburan, dengan musik yang mendominasi programnya. Hal itu dikarenakan oleh peraturan pemerintah yang mengatur pembatasan terhadap siaran politik dan agama. Pada 1939, siaran stasiun radio resmi Hindia Belanda, NIROM, bahkan didominasi oleh siaran musik melalui pemutaran piringan hitam dengan kategori musik klasik ringan. Perkembangannya juga tidak lepas dari peran klub gramofon yang memanfaatkan radio untuk mendapatkan informasi tentang rekaman. Pada dasarnya, banyak stasiun-stasiun radio swasta "Timur" yang berkembang pada 1930-an berfokus pada siaran musik lokal yang disiarkan secara langsung. Hal tersebut tentunya berdampak pada banyaknya musik lokal yang mulai tersedia secara komersial dalam bentuk rekaman pada pertengahan 1930-an (Lindsay 1997, 107-108).

Pada 1942, tepatnya pada akhir era kolonial Belanda, perkembangan radio telah menunjukkan karakteristik yang tidak biasa yaitu terkait dengan pengelolaan radio itu sendiri. Pada awalnya, radio sepenuhnya dikelola oleh swasta, akan tetapi pada perkembangannya kepemilikan radio menjadi milik bersama yaitu antara swasta dan pemerintah, tanpa monopoli teknologi oleh pemerintah kolonial. Radio berfungsi sebagai media hiburan dan budaya daripada berita dan informasi. Akan tetapi, hiburan dan budaya yang disampaikan kepada dua kelompok berbeda memiliki pemaknaan yang berbeda pula (Lindsay 1997, 106). Meskipun orang-orang menangkap siaran radio sebagai media hiburan dan budaya, di sisi lain siaran yang ditujukan untuk "orang Timur" memiliki makna terselubung, yaitu unsur nasionalisme.

NIROM, Jaringan Radio Hindia Belanda sebagai Media Propaganda

Sejak siaran radio mulai mengalami perkembangan seiring dengan munculnya *Bataviase Radio Vereniging* (BRV), pemerintah kolonial Hindia

Belanda merasa perlu untuk menyusun peraturan tentang penyiaran radio sehingga Undang-Undang Radio atau *Radiowet* diresmikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1934. Peresmian undang-undang tersebut disusul dengan kemunculan perkumpulan radio yang bernama *Nederlands Indische Radio Omroep* (NIROM) di Hindia Belanda. Sebelumnya, NIROM telah didirikan di Amsterdam pada 1928. Lembaga ini direncanakan menjadi stasiun radio yang akan menangani siaran ke seluruh Jawa dan dalam tiga tahun direncanakan mampu menjangkau seluruh wilayah Hindia Belanda. Akan tetapi, karena terjadi kendala teknis, NIROM baru resmi mengudara pada 1 April 1934 (Yampolsky 2010, 139).

Secara resmi NIROM mendapat izin dari pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyelenggarakan siaran radio dengan berbagai program. Selain itu, NIROM juga mendapatkan hak untuk menerima *luister bijdrage* atau iuran pendengar sebesar f. 150 gulden setiap bulan nya dari lembaga-lembaga radio. Pada masa itu, jaringan radio yang diizinkan oleh pemerintah hanya NIROM, sehingga didirikan beberapa stasiun *relay* untuk menghubungkan saluran telepon khusus dengan pemancar NIROM pusat (Maricar 1991). Stasiun-stasiun tersebut tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, antara lain seperti di Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, dan Malang. Pada awalnya hanya Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya yang dipilih oleh NIROM untuk pendirian studio cabang yang dilengkapi dengan stasiun transimisi. Adapun saluran telepon khusus tersebut disediakan oleh lembaga *Post, Telegraaf, en Telefoon Dienst* (PTT). Pada dasarnya, NIROM merupakan sebuah badan lembaga yang setengahnya merupakan bagian dari lembaga resmi milik pemerintah kolonial Hindia Belanda (Yampolsky 2014, 56).

Pada awal-awal tahun pendiriannya, beberapa program siaran radio di bawah NIROM lebih banyak disiarkan dengan bahasa Belanda. Setidaknya terdapat enam program yang disiarkan dari enam stasiun berbeda yang disiarkan oleh NIROM sebagai jaringan penyiaran. Setidaknya NIROM telah memproduksi dua program, yaitu *Oostersche Programma* untuk Jawa Barat dan

program yang berbeda untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbagai program yang diproduksi oleh NIROM memiliki konten yang berbeda-beda. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan program-program NIROM disiarkan di stasiun yang berbeda atau terpisah agar pelaksanaannya lebih mudah dilakukan (Yampolsky 2014, 88).

Perbedaan antara NIROM dengan kelompok radio swasta lainnya adalah kepemilikannya. Kelompok radio swasta merupakan milik pribadi sehingga hanya bertanggung jawab atas keanggotaan mereka. Sementara itu, NIROM bertanggung jawab kepada pemerintah karena merupakan perusahaan milik pemerintah. Oleh karena itu, NIROM tidak menekankan aspek komersial seperti kelompok-kelompok radio swasta. Selain itu, NIROM juga tidak menghasilkan uang dari iklan, tetapi mendapat keuntungan dari biaya lisensi wajib yang dikelola pemerintah yang dikenakan pada radio. Biaya lisensi tersebut dikenal juga sebagai *luister bijdrage* atau kontribusi mendengarkan atau *omrioepbijdrage* atau kontribusi penyiaran (*Soera Nirom* 1930). Sebagai balas budi akan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap NIROM, pemerintah memberikan tuntutan kepada NIROM untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa hanya dalam waktu satu tahun sejak penyiaran dimulai dan menjangkau seluruh wilayah koloni dalam waktu tiga tahun.

Tuntutan yang diberikan oleh pemerintah kepada NIROM wajib dilaksanakan oleh NIROM. Campur tangan pemerintah terhadap NIROM juga tercermin dari tanggung jawab yang dipegang oleh NIROM yaitu memastikan bahwa siarannya tidak bertentangan dengan kepentingan negara, hukum tanah, ketertiban umum, serta harus sesuai dengan moral.

Program-program siaran radio itu dalam perkembangannya diperluas dengan adanya program 'ketimuran', program yang ditujukan kepada para pendengar Indonesia. Salah satu cirinya adalah disiarkan dengan bahasa Melayu. Guna memperkaya program tersebut, NIROM juga menarik banyak grup orkes, salah satunya orkes *Lief Java* dan grup Hawaiian *Sweet Jawa Inlander* (Esha, dkk. 2005, 19-20).

Meskipun menyiarkan program "ketimuran" namun siaran pada NIROM tetap didominasi oleh program-program bernuansa politik. Siaran-siaran hiburan banyak yang diselingi dengan berbagai pidato, uraian, maupun ceramah. Salah satu doktrin yang disebarluaskan pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui NIROM adalah *etische politiek* untuk mengimbangi pergerakan kebangsaan di Indonesia yang semakin meningkat. Pergerakan tersebut bukanlah hal yang muncul tiba-tiba dan dapat ditelusuri sejak lahirnya "Sumpah Pemuda" pada 28 Oktober 1928.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menyadari bahwa pergerakan kebangsaan itu merupakan ancaman bagi kekuasaan kolonialnya. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda berupaya untuk mematahkan semangat pergerakan nasional dari para kaum pergerakan. Di sisi lain, sebelumnya telah ada lebih dulu sebuah pemancar radio Timur, misalnya di Surakarta yaitu Perhimpunan *Kunstkring* Jawa Mardi Raras Mangkunegaran (PK2MN) dengan seperangkat alat untuk menangkap siaran dari Belanda sejak 1927 (Puguh 2017, 139).

Pada perjalannya, NIROM benar-benar berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda. Jaringan radio Hindia Belanda tersebut memang didesain untuk melayani orang-orang Eropa di Hindia Belanda di satu sisi. Namun di sisi yang lain, NIROM juga tampak ingin merangkul pendengar non-Eropa, baik dari kalangan Bumiputera hingga Tionghoa Peranakan melalui berbagai program ketimurannya. Oleh sebab itu, pada akhirnya selanjutnya dibahas mengenai kedudukan dan respons NIROM dalam menghadapi persaingan "ruang udara" dengan jaringan radio Hindia Belanda yang ada pada saat itu.

Kekalahan NIROM dalam "Kontestasi Udara"

Dapat dikatakan bahwa radio memiliki posisi yang cukup penting dalam isu-isu besar sepanjang periode 1930-an, antara lain terkait modernitas, nasionalisme, hubungan antara penjajah dengan yang dijajah, bahkan lebih khusus terkait perkembangan kesadaran bangsa Indonesia tentang situasi dan zaman yang sedang dihadapi (Yampolsky 2014, 49). Selain banyaknya isu besar

yang mewarnai wilayah jajahan Hindia Belanda, yaitu Indonesia, pada periode 1930-an berbagai siaran radio lokal telah muncul lebih dulu. Misalnya di Yogyakarta, setidaknya terdapat beberapa studio siaran yang berdiri pada 1930-an, yaitu *Mataramse Voor Radio Omroep* (MAVRO) atau perkumpulan penyiar radio di Mataram (Yogyakarta). Perkumpulan ini didirikan atas inisiatif para kaum bangsawan di Yogyakarta yang didukung oleh orang-orang Belanda dan Tionghoa di Yogyakarta. Meskipun demikian, radio ini tetap berorientasi kebangsaan, tampak dari berbagai siarannya yang menggelorakan semangat bagi masyarakat Yogyakarta secara khusus (Dianasari 2021, 6-8). Dalam hal ini, penyiaran radio berfungsi sebagai alat penghubung dalam kehidupan sehari-hari yang berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat (Prayudha 2005, 9).

Radio-radio lokal memiliki perkembangan yang pesat, sehingga NIROM mencoba untuk merangkul radio-radio lokal untuk mengatasi ancaman kerugian. Di sisi lain, radio-radio lokal yang berada di bawah naungan Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) seperti, MAVRO, *Solosche Radio Vereeniging* (SRV), dan Radio Semarang juga saling bekerja sama dalam menyelenggarakan siaran Ketimuran sehingga semakin memperkuat kedudukan Radio Ketimuran dan menambah jumlah kepemilikan radio meskipun justru memberikan keuntungan bagi NIROM. Perkembangan radio di Hindia Belanda mengalami dinamika yang cukup sengit, tetapi apa yang dilakukan oleh NIROM justru mengobarkan semangat kebangsaan di kalangan perkumpulan Radio Ketimuran (Dianasari 2005, 10-12).

PPRK yang membawahi berbagai siaran radio lokal tidak hanya sekadar untuk menarik keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk memajukan kesenian dan kebudayaan nasional untuk kemajuan rohani, jasmani, sosial, dan kebudayaan masyarakat. Sejalan dengan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan oleh radio memiliki pengaruh yang kuat terhadap perasaan pendengar, bahkan secara personal para pendengar dapat merasakan keterlibatannya (Prayudha 2005, 14).

Bagi pemerintah Kolonial Hindia Belanda, NIROM dimanfaatkan sebagai alat propaganda

untuk menentang kaum pergerakan. Masyarakat Indonesia sebagai pendengar radio diminta untuk menentang dan menjauhi kaum pergerakan yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo, Ir. Sukarno, dan Sutan Syahrir karena radio mulai berfungsi sebagai alat politik meskipun beberapa kelompok tertentu tetap dihibur (Maricar 1991).

Sejak awal NIROM berdiri pada 1934 sebagai hasil dari penetapan Undang-Undang Radio atau *Radiowet*, lembaga ini telah memiliki dua fungsi. Fungsi tersebut yaitu untuk hiburan dan sebagai alat politik (Maricar 1991). Selama akhir 1930-an di Hindia Belanda, radio menjadi media utama bagi budaya dan hiburan, dengan musik yang mendominasi program siaran. Meskipun demikian, peraturan pemerintah tetap berlangsung untuk menghindari adanya siaran politik atau keagamaan dari radio swasta di Indonesia kontemporer. Pada 1939, stasiun resmi Hindia Belanda NIROM mencurahkan 80 persen waktu siaran penuh untuk musik. Mrazek telah menghitung tiga perempatnya diputar dari rekaman gramofon dan dari semua siaran musik tersebut 81 persen di antaranya berada dalam kategori "klasik ringan" atau "musik ringan dan kabaret."

Dalam beberapa hal, sebelumnya stasiun radio non-Timur Hindia awal berfungsi seperti klub gramofon, dengan perkumpulan pendengar mereka berbagi selera musik dan informasi tentang rekaman. Tentu saja perkembangan radio di Hindia Belanda – terutama stasiun radio non-Timur harus terlihat berkembang bergandengan tangan dengan gramofon dan rekaman 78 rpm, dengan masing-masing teknologi memperkuat yang lain. Meskipun gramofon telah diperkenalkan ke Hindia Belanda pada pergantian abad, harga untuk gramofon dan rekaman 78 rpm tidak mulai menurun sampai pertengahan 1920-an, tepatnya saat perkembangan radio (Mrazek 2002).

Namun, stasiun swasta "Timur" (Ketimoeran) yang berkembang selama tahun 1930-an, mengkhususkan diri dalam siaran musik lokal, disiarkan secara langsung. Hal ini terjadi meskipun pada pertengahan 1930-an ada kekayaan musik lokal yang luar biasa tersedia secara komersial pada rekaman 78 rpm. Philip Yampolsky menghitung bahwa sekitar sepuluh ribu cakram

musik Hindia lokal direkam untuk gabungan pasar Hindia Belanda/Malaya antara tahun 1903-1942, dengan masa kejayaan rekaman ini pada tahun 1930-an dan bertepatan dengan pengenalan radio. Namun meskipun ada industri rekaman lokal yang aktif, pilihan musik lokal yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan pilihan rekaman 78 rpm yang jauh lebih luas dari musik barat impor tarif dasar untuk sistem radio BRV/NIROM. Pada tahun-tahun puncak impor rekaman gramofon, yaitu akhir 1920-an sebelum Depresi, lebih dari satu setengah juta rekaman diimpor per tahun. Pada tahun 1930-an, angka ini menurun, tetapi impor masih rata-rata antara tiga ratus ribu hingga lima ratus ribu per tahun. Keputusan stasiun Ketimoeran untuk menyiaran pertunjukan langsung, meskipun, tampaknya bukan hanya faktor ketersediaan atau tidaknya rekaman. Siaran musik lokal langsung tampaknya telah menjadi visi utama radio mereka. Di satu sisi, dorongan untuk menyiaran musik mereka sendiri mungkin merupakan bagian dari "misi peradaban." Siaran Mangkunegara tentang musisi istananya, misalnya, membawa "seni keraton" kepada setiap pendengar yang memiliki akses ke penerima, pada saat di mana keluarga pangeran lainnya terutama di Yogyakarta juga "mendemokratisasi" seni mereka dengan membuatnya tersedia di luar istana. Siaran langsung menambahkan dimensi lain, dengan sekaligus melokalisasi sesuatu yang modern dan memodernisasi sesuatu yang lokal. Siaran langsung musik gamelan Mangunegara VII adalah aksi yang benar-benar modern. Transmisi pertunjukan lokal sebagai suara tanpa tubuh adalah fenomena yang dimungkinkan melalui teknologi radio. Tidak seperti rekaman gramofon, radio mengizinkan transmisi pertunjukan nyata secara real time, karena siaran musik tidak terbatas pada format tiga menit 78 rpm, juga bukan pemutaran ulang (Mrazek 1997).

Meskipun NIROM sebagai jaringan radio Hindia Belanda telah didirikan dengan fungsi mengawasi, akan tetapi pendiriannya tidak memengaruhi kaum pergerakan. Pada 29 Maret 1937, beberapa anggota *Volksraad* seperti M. Sutarjo Kartokusumo dan Ir. Sarsito Mangunkusumo menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil radio ketimuran di Bandung. Pertemuan tersebut kemudian

melahirkan sebuah organisasi federasi yang kembali menyatukan organisasi radio kebangsaan resmi berdiri, yaitu Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK). Selain itu, lembaga tersebut juga didirikan untuk mengambil alih siaran Ketimuran yang sebelumnya hanya diizinkan untuk disiarkan di NIROM saja ("Perdjoangan Radio Republik Indonesia," *Merdeka* 1951). Delapan stasiun radio tersebut kemudian dikelompokkan dengan misi sebagai "kelanjutan budaya asli ..." Pemisahan misi dari kedua sistem dipegang teguh oleh kelompok Ketimuran. Sebelumnya, ketika NIROM mengumumkan bahwa mereka akan memproduksi program musik lokalnya sendiri pada 1936, stasiun radio Ketimoeran memprotes. Pada tahun 1937, PPRK yang baru dibentuk berhasil melobi pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar asosiasi ini mengontrol siaran materi Ketimuran dan untuk mempertahankan waktu tayang di stasiun NIROM untuk siaran lokal Ketimuran (Kementerian Penerangan 1953, 10-11).

Pada perkembangannya, dibandingkan dengan statistik dari koloni tetangga, angka yang mengukur audiens radio di Hindia Belanda tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan audiens non-Eropa pada umumnya setara dengan Eropa. Pada 1939, terdapat empat puluh dua ribu lisensi penerima radio dipegang oleh "penduduk asli dan orang Asia lainnya" dibandingkan dengan empat puluh lima ribu untuk orang Eropa. Meskipun dua sistem-timur dan barat menargetkan audiens timur atau barat, pada kenyataannya ada persilangan yang cukup besar dari pendengaran, terutama dalam kasus "pribumi" mendengarkan saluran non-timur. Meningkatnya audiens yang mendengarkan siaran ketimuran pada tahun yang sama ditunjukkan melalui jumlah pelanggan radio non-Hindia Timur yang berjumlah 31.857 orang Eropa dan 21.706 "penduduk asli" dan "orang timur lainnya." (Mrazek 2002).

Pada akhir periode kolonial, penyiaran radio di Hindia Belanda telah menetap dalam sistem dualistik, terbagi baik dalam hal swasta dan negara, dan dalam hal timur dan barat. Pada tahun 1942, pada saat pendudukan Jepang, saluran resmi negara NIROM memiliki studio di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan, dengan

stasiun relai di Solo, Yogyakarta, Cepu, Malang, Sukabumi, Cirebon, Bogor, dan Padang. Siaran berita resmi dibuat melalui saluran ini. Ada empat stasiun radio swasta Belanda, masing-masing satu di Jakarta, Bandung dan dua di Yogyakarta (Kementerian Penerangan 1953, 21-22).

Oleh karena itu, dengan berdirinya PPRK serta perjuangan melalui siaran ketimuran, siaran-siaran ketimuran kemudian diserahkan kepada PPRK dari tangan NIROM sejak 1 November 1940. Hal itu dikarenakan siaran ketimuran yang dilakukan oleh NIROM tidak mampu bersaing dengan siaran ketimuran yang dilakukan oleh jaringan radio lokal.

Simpulan

Perkembangan radio yang pesat di wilayah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 sebagai dampak dari Perang Dunia I dan II menjadikan radio tidak hanya berfungsi sebagai media penyaluran pesan, akan tetapi juga berfungsi sebagai media hiburan bahkan alat politik.

Pemanfaatan radio sebagai media politik untuk kepentingan pemerintah Kolonial Hindia Belanda kemudian justru menjadi senjata makan tuan. Hal itu dikarenakan semangat kebangsaan justru tumbuh melalui radio. Kaum pergerakan menggerakkan radio sebagai media komunikasi politik bagi masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan siaran ketimuran. Siaran-siaran ketimuran secara terselubung dimanfaatkan oleh para pemuda untuk menggalang semangat kebangsaan hingga akhirnya radio dapat dikatakan sebagai media pemersatu semangat kebangkitan.

Radio Ketimuran yang disiarkan oleh radio-radio lokal menjadi salah satu bukti keberhasilan dalam melokalisasi modernitas sekaligus memodernisasi tradisi lokal di tengah ketatnya sensor kolonial. Pemanfaatan radio melalui NIROM yang awalnya didesain oleh pemerintah kolonial untuk pengawasan dan propaganda justru melahirkan sebuah paradoks "senjata makan tuan," yaitu ketika semangat kebangsaan justru semakin tumbuh melalui celah-celah siaran ketimuran yang dikelola secara mandiri oleh kaum pergerakan melalui organisasi seperti PPRK.

Referensi

- “Perdjoegan Radio Republik Indonesia,” *Merdeka*, edisi 10 September 1951.
- Bessire, Lucas & Daniel Fisher. 2013. “The Anthrology of Radio Fields.” *Annual Review of Anthropology* 42: 363-378. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qgcpc>
- Budiarto, Gema, Dewi Yuliati, Dhanang Respati Puguh. 2024. “Japanese Military Government Policy on Radio Broadcasting in Java (Kebijakan Pemerintah Militer Jepang terhadap Penyiaran Radio di Jawa).” *Mozaik* 24(1): 110-112. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v24i1.50425>
- Djajadiningrat, Madelon & Clara Brinkgreve. “A Musical Friendship: The Correspondence Between Mangkunegoro VII and the Ethnomusicologist Jaap Kunst, 1919 to 1940.” In *Recollecting Resonances: Indonesian-Dutch Musical Encounters* edited by Bart Barendregt and Els Bogaerts. Brill.
- Esha, Teguh, dkk. 2005. *Ismail Marzuki, Musik, Tanah Air, dan Cinta*. LP3ES Indonesia.
- Jedamski, Doris. 2001. “Reviewed Work(s): De Indische radio-omroep: Overheidsbeleid en ontwikkeling, 1932-1942 by Rene Witte.” *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde* 157 (4): 923-925.
- Jurriens, Edwin. 2009. *From Monologue to Diaologue: Radio and Reform in Indonesia*. Brill.
- Kementerian Penerangan. 1953. *Sedjarah Radio di Indonesia*. Djawatan Radio Republik Indonesia.
- Leksono, Ninok. 2014. *Seabad Ismail Marzuki: Senandung Melintas Zaman*. Penerbit Buku Kompas.
- Lindsay, Jennifer. 1997. “Private Radio and Local Identities in Indonesia.” *Indonesia* 64: 105-123.
- Maricar, Ari R. “Radio: Personal atau Komunal?,” *Bali Post*, edisi 11 September 1991.
- Martin, Gus. “Ismail Marzuki: Lagu Perjuangan Penuh Emosi dan Romantis,” *Bali Post*, edisi 11 September 1991.
- Monumen Pers Nasional. 2022. “Jejak Awal Radio Ketimuran dalam Sejarah Penyiaran Indonesia.” Diakses 26 Oktober 2024. <https://mpn.kominfo.go.id/index.php/2022/04/11/jejak-awal-radio-ketimuran-dalam-sejarah-penyiaran-indonesia/>.
- Mrazek, Rudolf. 1997. “Let Us Become Radio Mechanics: Technology and National Identity in Late-Colonial Netherlands East Indies.” *Comparative Studies in Society and History* 39 (1): 3-33. <https://doi.org/10.1017/S001041759700017>
- Mrazek, Rudolf. 2002. *Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony*. Princeton University Press
- Prayudha, Harley. 2005. *Radio Suatu Pengantar untuk Wacana dan Praktik Penyiaran*. Bayumedia Publishing.
- Puguh, Dhanang Respati. 2017. “Radio Republik Indonesia Surakarta, 1945-1960s: Its Role in Efforts to Maintain Indonesian Independence and the Formation of National Culture.” *Indonesian Historical Studies (IHiS)* 1 (2): 138-153. <https://doi.org/10.14710/ihis.v1i2.1919>
- Radio Republik Indonesia. 2023. “Mengenal Sejarah Berdirinya RRI.” Diakses pada 2 Oktober 2024. <https://www.rri.co.id/nasional/348245/mengenal-sejarah-berdirinya-rri>.
- Yampolsky, Philip. 2013. “Three Genres of Indonesian Popular Music: Their Trajectories in the Colonial Era and After.” *Asian Music* 44 (2): 24-80. <https://doi.org/10.1353/amu.2013.0018>
- Yampolsky, Philip. 2014. “Music on Dutch East Indies Radio in 1938: Representations of Unity, Disunity, and the Modern.” In *Sonic Modernities in the Malay World: A History of Popular Music, Social Distinction and Novel Lifestyles (1930s – 2000s)*, edited by Bart Barendregt. Brill.